

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah biasanya menimbulkan berbagai permasalahan yang berawal dari ketidakpuasan suatu golongan masyarakat, misalnya yang terkonsentrasi pada suatu daerah dan menuntut adanya otonomi yang lebih besar atas daerahnya sendiri. Untuk kasus Republik Afrika Selatan contohnya, kebijakan politik yang menimbulkan ketidakpuasan atau ditentang oleh sekelompok masyarakat tertentu adalah penerapan kebijakan politik *apartheid*.

Kebijakan politik *apartheid* merupakan kebijakan politik rasial yang telah diterapkan di Uni Afrika Selatan, suatu negara otonomi di dalam pemerintahan Kerajaan Inggris yang berdiri pada tanggal 31 Mei 1910. Kebijakan politik ini membatasi hak legislatif masyarakat kulit hitam. Sepanjang tahun 1920 – 1940, gerakan nasionalis Afrikaner mempunyai suatu kekhawatiran terhadap persaingan yang terjadi dengan masyarakat kulit hitam dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga sampai pada akhirnya dengan dukungan mayoritas Afrikaner, *National Party* memenangkan pemilu tahun 1948 pada platform *apartheid*. Sejak kemenangan pada pemilu tersebut Afrika Selatan dipegang oleh rezim *apartheid*.

Pemerintahan memberlakukan kebijakan ini di mana ketika Afrika Selatan diproklamasikan sebagai negara kulit putih dan kelompok ras lain, selain kulit putih tidak memiliki hak – hak politik penuh. Secara hukum, semua ras tersebut memiliki ruang terpisah dan fasilitas terpisah, tidak ada percampuran. Pendidikan yang diberikan pun akan disesuaikan dengan peran status orang tersebut di dalam masyarakat. Hendrik F. Verwoerd, perdana menteri Afrika Selatan yang menjabat dari tahun 1958 sampai terbunuhnya tahun 1966, berpendapat bahwa kesalahan besar jika Afrika Selatan hidup dalam kesejajaran dan persamaan hak. Merujuk pada pendapat bahwa negara Afrika Selatan adalah negara kulit putih, suatu sensus nasional dilaksanakan pada tahun 1980 menunjukkan bahwa 60 % penduduk Afrika Selatan merupakan kelompok masyarakat kulit hitam dan dari

sisanya 20 % populasi lain, kelompok masyarakat kulit putih hanya mempunyai presentase 16 %. Oleh sebab itu, sulit untuk menyatakan bahwa negara Afrika Selatan merupakan negara kulit putih.

Penekanan untuk menghapuskan kebijakan *apartheid* yang berdatangan dari berbagai pihak, baik internal maupun internasional, tidak menyurutkan pemerintahan untuk segera menghapuskan kebijakan ini, misalkan pada pemerintahan Pieter Willem Botha yang berkuasa dari tahun 1984 – 1989. Pemerintahan Botha memberlakukan reformasi terbatas dalam menanggapi tekanan tersebut. Reformasi terbatas ini diterapkan dalam konsep pemerintahan multiras, tetapi tetap terdapat pemisahan rasial di dalamnya. Konstitusi yang berlaku ini menyebutkan bahwa terdapat tiga ras di Afrika Selatan yaitu kelompok masyarakat kulit putih, Asia, dan berwarna lainnya tanpa termasuk masyarakat kulit hitam. Botha berharap dengan memberlakukan konstitusi seperti ini akan meningkatkan dukungan terhadap pemerintahannya agar bisa bertahan melawan tekanan – tekanan yang datang.

Namun pada kenyataannya, konstitusi yang diberlakukan Notha malah mendatangkan protes yang lebih banyak. Kecaman terus berdatangan dari internal Afrika Selatan dan internasional. Para penentang ini berpendapat bahwa dengan melembagakan dan mengesampingkan kelompok mayoritas masyarakat kulit hitam tidak akan melemahkan penekanan dan protes secara signifikan. Bentuk protes melawan konstitusi ini terwujud dalam penghancuran kantor dan gedung pemerintahan, serta rumah polisi dan dewan kota kulit hitam yang dianggap sebagai kolaborator rezim *apartheid*.

Pemogokan tenaga kerja dan serangkaian teror di dalam wilayah perkotaan terjadi sebagai bentuk protes dan keluhan ekonomi dan politik. Pada tahun 1987 pasukan bersenjata dari ANC dan PAC menyusup ke perbatasan Afrika Selatan dari basis pertahanan mereka di Angola, Mozambik, dan Zimbabwe. Melihat kondisi yang kacau ini, pemerintahan Botha memberlakukan keadaan darurat dengan mengirimkan pasukan untuk menyerang mereka yang menentang *apartheid* ke basis mereka di negara – negara tetangga. Tindakan represif pemerintahan Botha mampu meredam kekacauan dalam jangka pendek, tetapi

mendatangkan permasalahan lain. Tindakan pemerintahan menjadi berita utama politik dunia dan banyak pihak yang mengutuk tindakan yang sudah diambil pemerintahan Botha. Afrika Selatan mengalami inflasi kronis karena banyak investor asing yang menarik diri.

Menghadapi situasi seperti ini, pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya, yaitu Frederik Willem de Klerk (1989 – 1994) yang menggantikan Botha setelah pengunduran dirinya pada tahun 1989 karena penyakit stroke yang dideritanya, merasakan perlu adanya suatu reformasi besar – besaran jika ingin Afrika Selatan kembali stabil dalam perekonomian maupun perpolitikan. Frederik Willem de Klerk berkomitmen bahwa dirinya akan mempercepat reformasi hukum di Afrika Selatan.

Reformasi tersebut ia tunjukkan pada keadilan rasial. Pada pidato pertamanya, dirinya mengemukakan bahwa Afrika Selatan bukan negara rasis dan akan melakukan negosiasi mengenai masa depan negara tersebut, serta akan mengakhiri kebijakan politik *apartheid*. Sebagai bentuk tanggapan terhadap tuntutan dari dalam dan luar Afrika Selatan, de Klerk pada tahun 1990 dan 1991 mencabut dasar – dasar kebijakan *apartheid* seperti undang – undang pemisahan fasilitas, undang – undang tanah, masalah undang – undang registrasi kependudukan, reformasi hak – hak politik, ekonomi, pendidikan dan mengumumkan kebebasan Nelson Mandela. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Frederik Willem de Klerk ini mendapatkan tantangan berupa situasi sosial dan politik Afrika Selatan yang bergejolak. Terjadi kekacauan di berbagai tempat yang menimbulkan korban yang tidak sedikit jumlahnya. Bagi sebagian besar masyarakat, mereka menginginkan kebijakan *apartheid* tidak direformasi, melainkan digulingkan sepenuhnya.

Atas usaha gigihnya bersama Nelson Mandela, pada tahun 1993 de Klerk dihadiahi nobel perdamaian dengan keberhasilannya menghapuskan kebijakan *apartheid* dan meletakkan azas yang kokoh bagi Republik Afrika Selatan. Berdasarkan pada latar belakang yang dituliskan oleh penulis, timbul rasa ingin tahu dan ketertarikan penulis terhadap alasan Frederik Willem de Klerk menghapuskan kebijakan *apartheid* padahal de Klerk sendiri merupakan

golongan ras kulit putih yang seharusnya mempertahankan kedudukan serta kepentingan kulit putih di Republik Afrika Selatan yang merupakan kelompok minoritas dan upaya – upaya yang dilakukan de Klerk ketika menghapuskan kebijakan *apartheid*. Ketertarikan terhadap hal tersebut mendorong penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai situasi Afrika Selatan pada masa pemerintahan Frederik Willem de Klerk dengan mengangkat skripsi yang berjudul “Perkembangan Politik Apartheid di Republik Afrika Selatan Pada Masa Pemerintahan Frederik Willem De Klerk Tahun 1989 – 1994.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Rumusan masalah atau *research questions* diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena. Mengingat pentingnya kedudukan rumusan masalah di dalam kegiatan penelitian sampai muncul suatu anggapan bahwa rumusan masalah adalah separuh dari kegiatan penelitian.

Perumusan masalah penelitian dapat dibedakan dalam dua sifat, meliputi perumusan masalah deskriptif, apabila tidak menghubungkan antar fenomena, dan perumusan masalah eksplanatoris, apabila rumusannya menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih fenomena. Oleh sebab itu, berdasarkan pada hal – hal yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian di dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam karya tulis ilmiah dengan judul “Perkembangan Politik Apartheid di Republik Afrika Selatan Masa Frederik Willem De Klerk Pada Tahun 1989 – 1994.” adalah “Bagaimanakah perkembangan *apartheid* di Republik Afrika Selatan pada masa pemerintahan Frederik Willem de Klerk di Afrika Selatan dari tahun 1989 – 1994?”

Sementara itu untuk mengarahkan kajian penelitian di dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi sosial dan politik Afrika Selatan pada abad 20?

Veygi Yusna, 2013

Perkembangan Politik Apartheid Pada Masa Pemerintahan Frederik Willem de Klerk Tahun 1989-1994

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Bagaimanakah kondisi sosial dan politik di Republik Afrika Selatan pada masa pemerintahan Frederik Willem De Klerk tahun 1989 – 1991?
3. Bagaimanakah proses penghapusan kebijakan *apartheid* dilihat dari aspek sosial dan politik pada masa pemerintahan Frederik Willem de Klerk tahun 1991 – 1994?
4. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari penghapusan politik *apartheid* di Republik Afrika Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial politik Afrika Selatan pada masa pemerintahan Pieter Willem Botha tahun 1984 – 1989. Gambaran awal ini meliputi tokoh pencetus ideologi *apartheid*, pemberlakuan ideologi *apartheid*, dan sekilas gambaran kondisi sosial dan politik di Republik Afrika Selatan pasca diberlakukannya ideologi *apartheid* dari masa pemerintahan Hendrik Verwoerd sampai pemerintahan Pieter W. Botha.
2. Mengidentifikasi kondisi sosial dan politik pada masa pemerintahan Frederik Willem de Klerk tahun 1989 – 1994. Kondisi sosial dan politik ini meliputi peristiwa – peristiwa yang terjadi di dalam pemerintahan Frederik Willem De Klerk dari tahun 1989 – 1994.
3. Memperoleh gambaran tentang realisasi kebijakan *apartheid* pada masa Frederik Willem de Klerk tahun 1989 – 1991. Realisasi ini maksudnya akan membandingkan antara kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Frederik Willem de Klerk dengan realisasinya di dalam kehidupan masyarakat Republik Afrika Selatan, sehingga bisa dilihat berbagai perbedaan atau penyimpangannya.
4. Memperoleh gambaran mengenai dampak yang ditimbulkan dari dihapusnya politik *apartheid* di Republik Afrika Selatan oleh pemerintahan F. W. de Klerk.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sejarah sosial dan politik, serta diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai peranan Frederik Willem de Klerk di dalam menghapuskan kebijakan *apartheid* di Republik Afrika Selatan. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengajarkan toleransi dan saling menghargai antar satu sama lain tanpa melihat identitas suatu bangsa didasarkan pada ras, budaya, agama, ideologi dan lain – lain.
2. Memberikan gambaran mengenai proses masuknya ideologi *apartheid* ke Republik Afrika Selatan.
3. Memberikan gambaran mengenai kondisi sosial politik di Afrika Selatan sebelum pemerintahan Frederik Willem de Klerk dan pada saat berlangsungnya pemerintahan Frederik Willem de Klerk tahun 1989 - 1994.
4. Memberikan pemaparan mengenai realisasi kebijakan *apartheid* pada masa pemerintahan Frederik Willem De Klerk di Republik Afrika Selatan tahun 1989 – 1990.
5. Memberikan penjelasan mengenai dampak – dampak dihapuskannya kebijakan *apartheid* oleh Frederik Willem de Klerk terhadap kondisi sosial politik di Republik Afrika Selatan selama pemerintahannya berlangsung dari tahun 1989 – 1994.
6. Memberikan pemaparan mengenai proses penghapusan kebijakan *apartheid* di Republik Afrika Selatan oleh pemerintahan Frederik Willem de Klerk tahun 1989 – 1994. Selain itu, memberikan pemaparan tahapan – tahapan perubahan undang – undang *apartheid* dari tahun 1989 – 1994.
7. Memperkaya pembelajaran di sekolah mengenai peristiwa – peristiwa seputar Perang Dunia II, sesuai dengan materi pembelajaran Sejarah Kelas XII Program IPS Semester II Standar Kompetensi “Menganalisis Perkembangan Sejarah Dunia Sejak Perang Dunia II sampai dengan

Perkembangan Mutakhir” dengan Kompetensi Dasar 2.2 yaitu “Kemampuan menganalisis perkembangan mutakhir dunia.”

1.5 Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah mengenai dinamika *apartheid* dari awal kemunculan sampai pada tahapan penghapusan kebijakan diskriminasi rasial. Selain itu akan dijelaskan pula mengenai kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan sebelum pemerintahan dan sedikit gambaran pada masa berlangsungnya pemerintahan Frederik de Klerk. Agar permasalahan tidak melebar maka dibuatkan rumusan masalah sehingga dapat dikaji secara khusus di dalam penulisan ini. Pada akhir bab ini akan dimuat mengenai sistematika penulisan yang akan menjadi kerangka dan pedoman di dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini dipaparkan mengenai sumber – sumber buku dan sumber lainnya, seperti jurnal, yang digunakan sebagai referensi yang dianggap relevan dengan tema penelitian. Kemudian peneliti akan menjelaskan mengenai konsep diskriminasi rasial, *apartheid*, dan pendekatan teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Selain itu, dijelaskan pula tentang beberapa kajian dan penelitian terdahulu mengenai kondisi sosial dan politik sebelum dan setelah penerapan kebijakan Frederik de Klerk di Afrika Selatan.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai serangkaian tahapan yang ditempuh penulis ketika melakukan penelitian guna mendapatkan data dari sumber yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Adapun metode yang digunakan adalah metode historis dan teknik yang digunakan adalah studi literatur.

Bab IV Pembahasan, penulis akan memaparkan kembali sekilas mengenai kondisi sosial politik di Afrika Selatan sebelum pemerintahan serta saat pemerintahan Frederik de Klerk berlangsung. Kemudian penulis akan

menguraikan lebih rinci mengenai kondisi sosial dan politik di Republik Afrika Selatan pada masa pemerintahan Frederik Willem De Klerk tahun 1989 – 1994. Selain itu, akan dipaparkan pula mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Frederik Willem De Klerk serta pengaruh dari penerapan kebijakan yang diambil tersebut. Penulis juga akan memaparkan faktor - faktor dan proses dihapuskannya kebijakan politik *apartheid*.

Bab V Kesimpulan, merupakan bagian terakhir dari rangkaian penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan di dalam rumusan masalah. Direkomendasikan pula kepada pembaca mengenai nilai – nilai yang dapat diambil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

